JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

Analisis Perilaku Pekebun Terhadap Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Dharmasraya

Septa Wahyuda[1)], Muhammad Makky[2)], Efa Yonnedi[3)], Juniarti[4)]

Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

Corresponding author: septawahyuda749@gmail.com

Abstrak

Perkebunan kelapa sawit rakyat berperan penting dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Dharmasraya, namun penerapan tata kelola yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi pekebun terhadap *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), pengetahuan pekebun terhadap aspek ekologi perkebunan kelapa sawit, serta perilaku pekebun dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan pada Mei–Agustus 2025 dengan pendekatan *mixed methods*. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 100 pekebun yang ditentukan dengan rumus Slovin, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pekebun dan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Data dianalisis secara statistik deskriptif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekebun belum mengetahui keberadaan, tujuan, dan manfaat ISPO sehingga belum ada pekebun rakyat yang tersertifikasi. Pekebun lebih menyadari dampak lingkungan yang bersifat langsung, seperti pencemaran udara akibat pembakaran lahan (97%), dibandingkan dampak jangka panjang seperti penurunan kualitas air tanah (38%) dan keanekaragaman hayati. Sebagian besar pekebun telah membuka lahan tanpa bakar (87%), menggunakan bibit bersertifikat (76%), dan memanfaatkan lahan bebas konflik (100%), tetapi penggunaan pupuk organik (57%) dan pengendalian organisme pengganggu tanaman secara organik (25%) masih terbatas. Dari sisi ekonomi, kelapa sawit dinilai meningkatkan pendapatan (94%) dan menyerap tenaga kerja lokal (97%). Perilaku pekebun dipengaruhi oleh tingkat persepsi dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga sosialisasi, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan pekebun diperlukan untuk mendorong tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Kata kunci: Keberlanjutan, Kelapa Sawit, ISPO, Perilaku Pekebun, Tata Kelola

Abstract

Smallholder oil palm plantations play an important role in the economy of Dharmasraya Regency, yet the implementation of sustainable governance remains a challenge. This study aims to analyze smallholder perceptions of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) standard, their knowledge of the ecological aspects of oil palm plantations, and their behavior in sustainable plantation governance. The study was conducted from May to August 2025 using a mixed methods approach. Quantitative data were collected through questionnaires from 100 smallholders determined using the Slovin formula, while qualitative data were obtained through in-depth interviews with smallholders and the Dharmasraya Regency Agriculture Office. Data were analyzed using descriptive statistics and qualitative descriptive analysis. The results show that smallholders are not yet aware of the existence, objectives, and benefits of ISPO, and none of the smallholders has been certified. Smallholders are more aware of direct environmental impacts, such as air pollution from burning (97%), than of long-term impacts such as declining groundwater quality (38%) and biodiversity loss. Most smallholders have cleared land without burning (87%), used certified seedlings (76%), and cultivated conflict-free

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

land (100%), but the use of organic fertilizer (57%) and organic pest control (25%) remains limited. Economically, oil palm is considered to increase income (94%) and to absorb local labor (97%). Smallholder behavior is shaped by their level of perception and knowledge; therefore, outreach, technical assistance, and stronger farmer institutions are needed to promote sustainable oil palm plantation governance.

***Key words**: Sustainability, Oil Palm, ISPO, Smallholder Behavior, Governance*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan strategis bagi Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia. Komoditas ini menjadi sumber devisa, penyedia lapangan kerja, dan penggerak ekonomi perdesaan, tetapi pada saat yang sama dihadapkan pada tuntutan pelestarian lingkungan, standardisasi keberlanjutan, dan dinamika kebijakan perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia berupaya mengatur tata kelola perkebunan kelapa sawit melalui sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) guna mendorong praktik yang lebih berkelanjutan (Basir, 2025). Sertifikasi ini semula diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dan kini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, yang mewajibkan sertifikasi bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, sedangkan bagi pekebun kewajiban tersebut berlaku empat tahun sejak peraturan diundangkan, yaitu mulai Maret 2029 (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga memunculkan persoalan ekologis yang perlu mendapat perhatian serius. Konversi hutan menjadi kebun monokultur memicu penurunan keanekaragaman hayati, mengganggu fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan pengatur siklus hidrologi, sedangkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara intensif turut menurunkan kualitas tanah dan mencemari sumber daya air di sekitarnya (Obidzinski et al., 2012). Oleh karena itu, pengelolaan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial.

Dalam konteks tersebut, perilaku pekebun memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan usaha perkebunan rakyat (Aisyah et al., 2021). Cara pekebun mengelola kebunnya sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pengalaman, dan dukungan yang diterima dari pemerintah maupun perusahaan. Pekebun yang memahami standar ISPO cenderung lebih sadar dan berusaha menerapkan praktik ramah lingkungan, misalnya membuka lahan tanpa membakar dan menggunakan bibit bersertifikat (Nashr et al., 2021). Sebaliknya, pekebun yang kurang memiliki akses terhadap informasi dan pendampingan masih menerapkan praktik konvensional yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan, seperti penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan (Suardi et al., 2022). Dengan demikian, perubahan perilaku pekebun menjadi kunci dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan keberlanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit (Siahaan et al., 2023).

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu sentra perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat. Luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten ini meningkat dari 32.569 ha pada tahun 2020 menjadi 34.738 ha pada tahun 2024, dengan produksi mencapai 127.906 ton pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik [BPS] Kabupaten Dharmasraya, 2025). Sektor ini menjadi tumpuan hidup bagi sekitar 29.222 pekebun. Pekebun di daerah ini mengelola kebun dengan cara tradisional maupun modern, baik secara swadaya maupun melalui kemitraan plasma-inti dengan perusahaan. Namun,

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

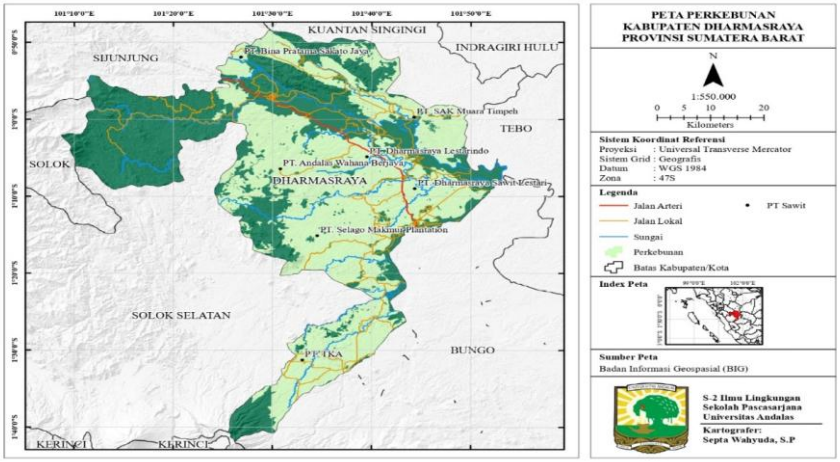
sebagian pekebun masih menggunakan metode lama seperti pembakaran lahan, dan penerapan praktik ramah lingkungan masih terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan keterampilan.

Implementasi ISPO sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi pekebun melalui teknik budidaya ramah lingkungan, peningkatan produktivitas, dan akses pasar. Akan tetapi, pekebun kecil sering kesulitan memenuhi standar ISPO karena biaya sertifikasi yang tinggi, beban administrasi yang berat, dan lemahnya pendampingan. Di tingkat Kabupaten Dharmasraya, informasi mengenai pemahaman dan perilaku pekebun terhadap standar keberlanjutan masih terbatas, meskipun daerah ini mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor kelapa sawit.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis persepsi pekebun terhadap ISPO sebagai acuan budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan; (2) menganalisis pengetahuan dan persepsi pekebun terhadap ekologi perkebunan kelapa sawit; dan (3) menganalisis perilaku pekebun dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program pendampingan dan kebijakan yang lebih efektif untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kebun rakyat Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, pada bulan Mei–Agustus 2025. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perilaku pekebun dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit, pengetahuan terhadap standar ISPO, serta persepsi mengenai aspek ekologi dan kontribusi ekonomi perkebunan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan, serta data sekunder yang bersumber dari laporan pemerintah, data BPS, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Sebaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya sebagai lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta sebaran perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya (Sumber: BIG, diolah penulis, 2025)

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Populasi penelitian adalah pekebun kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya yang berjumlah 29.222 orang. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan 10% sehingga diperoleh 99,65 yang dibulatkan menjadi 100 responden. Responden dipilih secara *purposive* dengan kriteria: pekerja perkebunan, berdomisili di Kabupaten Dharmasraya, memiliki pengalaman minimal lima tahun dalam usaha kelapa sawit, serta bersedia mengisi kuesioner dan mengikuti wawancara. Kuesioner mengukur tiga variabel, yaitu (1) perilaku pekebun dalam perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, (2) persepsi dan pengetahuan pekebun terhadap ekologi perkebunan kelapa sawit, dan (3) perekonomian pekebun kelapa sawit. Instrumen pengetahuan ekologi diadaptasi dari Ramadhani dan Maulidian (2020), sedangkan instrumen perilaku dan sosial ekonomi diadaptasi dari Yutika et al. (2019), dengan skala Likert lima tingkat mulai dari sangat setuju (SS) hingga sangat tidak setuju (STS).

Perilaku pekebun diukur melalui lima indikator yang mewakili aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi keberlanjutan, yaitu: membuka atau membersihkan lahan tanpa dibakar, menggunakan pupuk organik, mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT) secara organik, menggunakan bibit bersertifikat, serta menggunakan lahan yang bebas konflik (Yutika et al., 2019). Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam yang bersifat fleksibel dengan informan kunci, yaitu pekebun, tokoh masyarakat, dan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya. Informan dipilih berdasarkan prinsip kesesuaian dan kecukupan informasi terhadap fenomena yang diteliti.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif, yaitu distribusi frekuensi dan persentase, untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban terhadap setiap pernyataan. Pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara interaktif. Hasil kedua analisis kemudian dipadukan dan dibandingkan dengan prinsip dan kriteria ISPO untuk menggambarkan tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Dharmasraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah ±2.961,13 km². Secara geografis, kabupaten ini terletak pada 0°47′–1°49′ Lintang Selatan dan 101°22′–101°54′ Bujur Timur. Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung di sebelah utara, Provinsi Jambi di sebelah selatan dan timur, serta Kabupaten Solok Selatan di sebelah barat. Secara administratif, Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Koto Baru, Koto Besar, Pulau Punjung, Sitiung, Timpeh, Sungai Rumbai, Asam Jujuhan, Koto Salak, Padang Laweh, Tiumang, dan IX Koto (Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 2025).

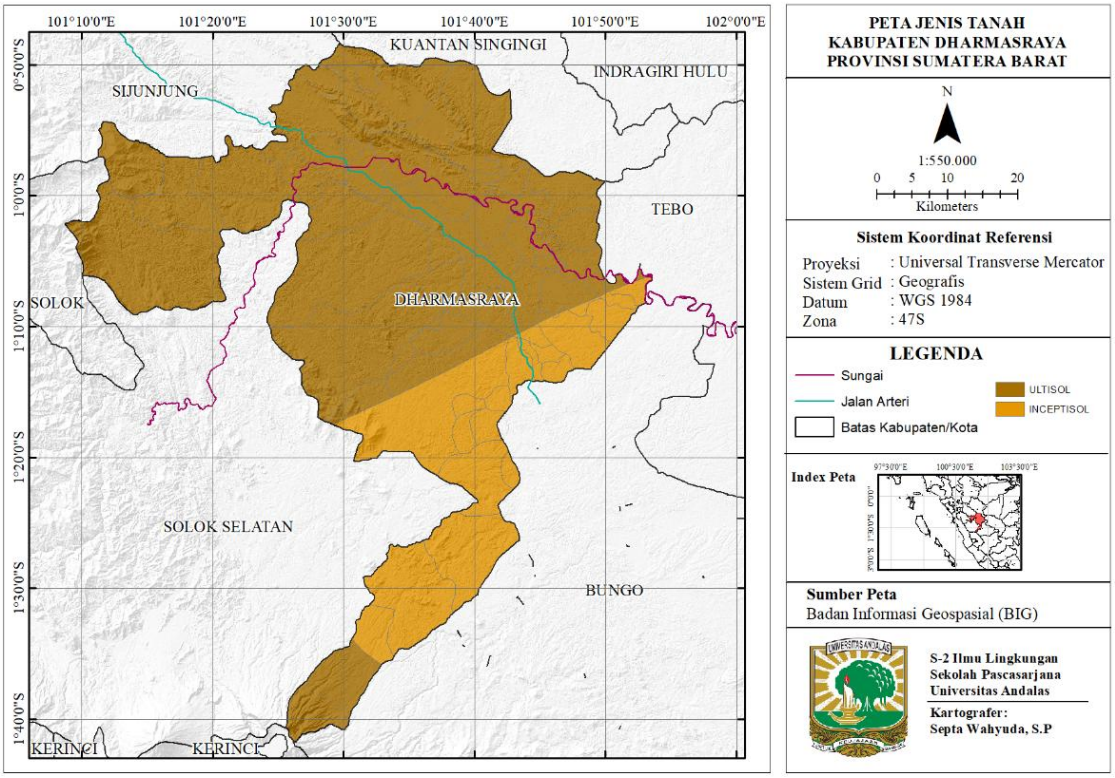
Kabupaten Dharmasraya memiliki iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 21,0 °C hingga 33,0 °C, rata-rata jumlah hari hujan 14,35 hari per bulan, dan curah hujan rata-rata 265,36 mm per bulan. Kondisi iklim yang tergolong basah ini mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Topografi wilayah bervariasi mulai dari

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

datar, bergelombang, hingga berbukit dengan ketinggian antara 98,3 hingga 1.525 mdpl. Lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh tanah Ultisol dan Inceptisol, sebagaimana ditunjukkan pada peta jenis tanah pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta jenis tanah Kabupaten Dharmasraya (Sumber: BIG, diolah penulis, 2025)

Tanah Ultisol dan Inceptisol dikenal bersifat masam, miskin hara, dan rendah C-organik sehingga menjadi tantangan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Nilai pH dan C-organik kedua jenis tanah tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai pH H_2O dan C-Organik Tanah di Kabupaten Dharmasraya

Jenis tanah	pH H_2O	C-organik (%)	Kriteria
Ultisol	4,65–5,12	0,38–1,10	pH masam, C-organik rendah–sangat rendah
Inceptisol	4,54–4,86	1,33–1,85	pH masam, C-organik rendah

Sumber: Anggun (2024)

Tabel 1 menunjukkan bahwa tanah Ultisol dan Inceptisol di Kabupaten Dharmasraya memiliki pH masam (4,54–5,12) dan kandungan C-organik rendah hingga sangat rendah (0,38–1,85%), sedangkan pH tanah yang ideal bagi pertumbuhan kelapa sawit berkisar 5,0–6,0 (Pahan, 2012). Tanah yang masam dapat menghambat ketersediaan unsur hara makro seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), sedangkan rendahnya C-organik membatasi

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

kemampuan tanah dalam menyimpan hara dan air. Apabila tidak dikelola dengan tepat, budidaya kelapa sawit pada tanah tersebut dapat menimbulkan pencucian unsur hara, erosi pada lahan miring dan berbukit, penurunan C-organik, serta pencemaran lingkungan akibat limbah perkebunan yang tidak terkelola. Oleh karena itu, penggunaan pupuk organik, pemupukan berimbang, dan pemberian kapur (dolomit) merupakan bagian penting dari praktik budidaya kelapa sawit berkelanjutan di tingkat pekebun.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden diamati dari lima variabel, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, lama bekerja di sektor kelapa sawit, dan luas lahan yang dikelola. Uraian ini penting untuk memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan demografis responden yang dapat memengaruhi pola pengelolaan kebun serta penerapan prinsip keberlanjutan. Distribusi responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden (n = 100)

Karakteristik	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	65	65
	Perempuan	35	35
Usia	Dewasa awal (26–35 tahun)	16	16
	Dewasa akhir (36–45 tahun)	32	32
	Lansia awal (46–55 tahun)	33	33
	Lansia akhir (>56 tahun)	19	19
Pendidikan terakhir	SD/sederajat	25	25
	SLTP/sederajat	26	26
	SLTA/sederajat	46	46
	Sarjana	3	3
Lama bekerja di sektor sawit	5–10 tahun	52	52
	11–15 tahun	26	26
	16–20 tahun	5	5
	>20 tahun	17	17
Luas lahan	≤ 2 ha	46	46
	3–5 ha	36	36
	6–10 ha	8	8
	>10 ha	10	10

Sumber: Data primer diolah, 2025

Responden didominasi laki-laki (65%). Dominasi ini berkaitan dengan tuntutan pekerjaan perkebunan yang memerlukan tenaga fisik besar, risiko kerja yang cukup tinggi, serta konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama keluarga, sedangkan perempuan umumnya terlibat pada pekerjaan yang lebih ringan (Fatchiya et al.,

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

2022). Dari segi usia, mayoritas responden berada pada kelompok lansia awal (46–55 tahun) sebesar 33% dan dewasa akhir (36–45 tahun) sebesar 32%, sementara kelompok dewasa awal hanya 16%. Kondisi ini menunjukkan bahwa regenerasi pekebun masih menjadi tantangan, padahal keterlibatan generasi muda penting bagi adopsi teknologi ramah lingkungan dan standar sertifikasi.

Tingkat pendidikan responden sebagian besar berada pada jenjang SLTA (46%), sedangkan hanya 3% yang berpendidikan sarjana. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya pemahaman terhadap praktik keberlanjutan, karena pengetahuan budidaya lebih banyak diperoleh dari pengalaman lapangan dibandingkan pelatihan formal. Sebagian besar responden telah berkecimpung di sektor sawit selama 5–10 tahun (52%) dan tergolong pekebun kecil dengan luas lahan ≤ 2 ha (46%) dan 3–5 ha (36%). Skala usaha yang kecil membuat pekebun rentan terhadap fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) dan keterbatasan modal, sehingga karakteristik usia, pendidikan, pengalaman, dan kepemilikan lahan perlu diperhatikan dalam merancang strategi pendampingan keberlanjutan.

Persepsi Pekebun terhadap ISPO

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pekebun sawit rakyat di Kabupaten Dharmasraya belum mengetahui keberadaan maupun tujuan regulasi ISPO. Akibatnya, tidak ada satu pun pekebun yang memiliki sertifikat ISPO, dan sebagian besar responden mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun informasi resmi dari pemerintah atau lembaga terkait. Karena tidak memahami regulasi tersebut, pekebun tidak dapat memberikan penilaian yang jelas terhadap ISPO, bahkan sebagian mengira ISPO hanya berlaku bagi perusahaan besar. Temuan ini sejalan dengan Martianto et al. (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan pekebun terhadap ISPO merupakan hambatan utama penerapan standar keberlanjutan di tingkat petani kecil, serta Hidayat et al. (2018) yang menemukan bahwa pekebun kecil menganggap ISPO hanya berlaku untuk perusahaan besar.

Kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Pada awalnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 hanya mewajibkan ISPO bagi perusahaan perkebunan, sedangkan bagi kebun plasma dan kebun swadaya sertifikasi bersifat sukarela (Kementerian Pertanian, 2015). Kewajiban bagi pekebun baru ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 dengan masa transisi lima tahun, kemudian diatur kembali dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 yang memberlakukan kewajiban tersebut bagi pekebun mulai tahun 2029 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020, 2025). Dengan sisa waktu yang terbatas, belum adanya pekebun bersertifikat di Kabupaten Dharmasraya menjadi persoalan yang mendesak. Padahal, sertifikasi ini dirancang untuk membantu pekebun dalam tata kelola kebun, akses pasar, dan praktik budidaya yang ramah lingkungan (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020a). Upaya pekebun untuk menuju sertifikasi pun belum ada karena mereka tidak mengetahui langkah yang harus ditempuh. Meskipun demikian, pekebun menyatakan bersedia mengikuti proses sertifikasi ISPO apabila tersedia informasi, bimbingan teknis, dan bantuan biaya. Hal ini sejalan dengan Hospes (2014) yang menekankan pentingnya dukungan kelembagaan, insentif, dan kemitraan dalam mendorong pekebun kecil mengadopsi sertifikasi keberlanjutan.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

Wawancara dengan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya mengonfirmasi bahwa belum ada pekebun rakyat yang tersertifikasi ISPO. Persyaratan ISPO mewajibkan kebun telah teregistrasi melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sementara sebagian besar kebun rakyat belum masuk ke dalam data resmi. Pada tahun 2023 terdapat sekitar 500 pekebun yang telah memiliki STDB dan menjadi percontohan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran untuk registrasi kebun dan penyuluhan. Strategi yang ditempuh meliputi sosialisasi pada pertemuan kelompok tani, penyuluhan lapangan, penguatan kelembagaan melalui kelompok tani dan koperasi, serta fasilitasi administrasi. Target jangka pendek pemerintah daerah adalah percepatan registrasi kebun melalui STDB, sedangkan target jangka panjangnya adalah mendorong sekitar 4.000 pekebun masuk ke dalam program PSR sekaligus memperoleh sertifikasi ISPO. Dengan demikian, penerapan ISPO di Kabupaten Dharmasraya masih berada pada tahap awal.

Pengetahuan Pekebun terhadap Ekologi Perkebunan Kelapa Sawit

Pengetahuan pekebun terhadap aspek ekologi perkebunan kelapa sawit diukur melalui sembilan pernyataan yang mencakup pencemaran udara, kualitas dan ketersediaan air tanah, serta keanekaragaman hayati dan habitat fauna. Rekapitulasi jawaban responden disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengetahuan Pekebun terhadap Ekologi Perkebunan Kelapa Sawit (%)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Pembakaran lahan dan limbah sawit dapat menyebabkan pencemaran udara	54	43	1	2	0
2	Kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan pencemaran udara	10	25	6	55	4
3	Kendaraan pengangkut sawit dapat menyebabkan pencemaran udara	1	24	6	63	6
4	Air tanah mengandung minyak karena adanya perkebunan kelapa sawit	1	5	0	77	17
5	Perkebunan kelapa sawit dapat mengganggu ketersediaan air tanah	27	40	5	28	0
6	Adanya perkebunan kelapa sawit tidak menyebabkan penurunan kualitas air tanah	4	58	0	29	9
7	Perkebunan kelapa sawit meningkatkan keanekaragaman hayati	0	40	9	51	0
8	Keberadaan perkebunan sawit tidak mengganggu habitat fauna	2	65	2	31	0
9	Adanya perkebunan kelapa sawit mengakibatkan fauna merusak lahan pertanian dan perumahan	15	49	3	33	0

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

Keterangan: SS = sangat setuju, S = setuju, N = netral, TS = tidak setuju, STS = sangat tidak setuju. Sumber: Data primer diolah, 2025; pernyataan kuesioner diadaptasi dari Ramadhani dan Maulidian (2020)

Pencemaran udara

Sebanyak 97% responden (54% sangat setuju dan 43% setuju) menyatakan bahwa pembakaran lahan dan limbah sawit dapat menyebabkan pencemaran udara. Tingginya kesadaran ini penting karena pembakaran biomassa menghasilkan partikel halus (PM2.5), karbon monoksida, karbon dioksida, dan senyawa beracun lain yang berkontribusi terhadap kabut asap dan perubahan iklim (Tacconi, 2016), serta menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon dan kabut asap lintas negara di Asia Tenggara (Gaveau et al., 2014; Marlier et al., 2015). Paparan asap pembakaran juga dapat menimbulkan gangguan pernapasan dan penyakit kardiovaskular bagi masyarakat sekitar (World Health Organization, 2016).

Namun, pengetahuan tersebut belum menyeluruh. Mayoritas responden justru tidak setuju (55%) bahwa kegiatan pembukaan lahan menyebabkan pencemaran udara, dan 69% tidak setuju bahwa kendaraan pengangkut sawit berkontribusi terhadap pencemaran udara. Persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman langsung pekebun yang umumnya membuka lahan secara manual atau mekanis sehingga tidak merasakan adanya asap. Padahal, sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi karbon, terutama kendaraan bermesin diesel dengan standar emisi rendah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2019), dan truk pengangkut TBS turut meningkatkan polutan udara seperti CO_2, NOx, dan partikulat (Julius et al., 2017). Hal ini menegaskan perlunya edukasi mengenai dampak lingkungan dari seluruh tahapan pengelolaan perkebunan.

Pencemaran dan ketersediaan air tanah

Sebagian besar responden (94%) tidak setuju bahwa air tanah mengandung minyak akibat perkebunan kelapa sawit, dan 62% menilai perkebunan sawit tidak menurunkan kualitas air tanah. Artinya, hanya 38% pekebun yang menyadari potensi penurunan kualitas air tanah. Persepsi ini berbeda dengan temuan ilmiah yang menunjukkan bahwa limbah cair pabrik kelapa sawit (*palm oil mill effluent*/POME) dapat memengaruhi kualitas air jika tidak dikelola dengan baik (Ahmad et al., 2013), dan konversi hutan hujan menjadi kebun sawit cenderung mengalihkan curah hujan menjadi limpasan permukaan sehingga berkontribusi pada kelangkaan air secara periodik (Merten et al., 2016). Penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan juga berpotensi menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem akuatik (Giam et al., 2016; Susanti & Maryono, 2018).

Sebaliknya, 67% responden setuju bahwa perkebunan kelapa sawit dapat mengganggu ketersediaan air tanah, sejalan dengan Obidzinski et al. (2012) yang menyebutkan bahwa konsumsi air oleh tanaman sawit cukup tinggi, terutama pada musim kemarau. Di lapangan ditemukan penanaman sawit hingga ke tepi sungai tanpa jarak sempadan, yang berpotensi mempercepat penyerapan cadangan air tanah dan menurunkan debit air. Pekebun menanam sawit di dekat sungai bukan karena sengaja melanggar aturan, melainkan karena keterbatasan lahan dan belum mengetahui dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, penerapan zona penyangga (*buffer zone*) di sempadan sungai, teknik

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

konservasi air seperti parit buntu dan sumur resapan, serta pola tanam agroforestri sawit perlu didorong melalui pendampingan.

Keanekaragaman hayati dan habitat fauna

Sebanyak 51% responden tidak setuju bahwa perkebunan kelapa sawit meningkatkan keanekaragaman hayati. Sebagian masyarakat menilai bahwa perkebunan sawit menyebabkan hilangnya vegetasi alami, sejalan dengan Fitzherbert et al. (2008) yang menyatakan bahwa konversi hutan menjadi kebun sawit menurunkan keanekaragaman spesies, khususnya satwa yang bergantung pada ekosistem hutan. Di sisi lain, 67% responden menilai keberadaan sawit tidak mengganggu habitat fauna, namun 64% juga menyatakan bahwa sawit memicu satwa seperti babi hutan dan monyet merusak lahan pertanian dan permukiman. Dualitas persepsi ini selaras dengan Meijaard et al. (2018) yang menjelaskan bahwa perkebunan sawit menekan habitat asli fauna sehingga mendorong satwa mencari makan di area pertanian dan desa. Kemampuan sebagian fauna generalis untuk bertahan di perkebunan tidak mencerminkan ekosistem yang seimbang, melainkan bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan habitat alami (Savilaakso et al., 2014). Oleh karena itu, pengelolaan sawit yang ramah biodiversitas, seperti mempertahankan koridor satwa dan sempadan sungai, perlu diterapkan.

Sosial Ekonomi Pekebun Kelapa Sawit

Persepsi pekebun terhadap aspek sosial ekonomi perkebunan kelapa sawit diukur melalui tujuh pernyataan yang mencakup kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Hasilnya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Persepsi Pekebun terhadap Aspek Sosial Ekonomi Perkebunan Kelapa Sawit **(%)**

No	Pernyataan	Setuju (SS + S)	Netral	Tidak setuju (TS + STS)
1	Perkebunan kelapa sawit dapat menambah lapangan pekerjaan	87	5	8
2	Perkebunan kelapa sawit banyak menyerap tenaga kerja	61	14	25
3	Tenaga kerja di kebun sawit merupakan masyarakat lokal	97	0	3
4	Perkebunan kelapa sawit dapat menghasilkan pendapatan yang stabil	80	11	9
5	Pendapatan masyarakat sebagian besar diperoleh dari perkebunan kelapa sawit	92	6	2
6	Adanya perkebunan sawit dapat meningkatkan pendapatan masyarakat	94	6	0
7	Perkebunan kelapa sawit meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit	95	3	2

Sumber: Data primer diolah, 2025; pernyataan kuesioner diadaptasi dari Yutika et al. (2019)

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

Masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kontribusi perkebunan kelapa sawit dalam menyediakan kesempatan kerja. Sebanyak 87% responden menilai perkebunan sawit menambah lapangan pekerjaan dan 97% menyatakan tenaga kerja di kebun sawit sebagian besar berasal dari masyarakat lokal. Namun, hanya 61% yang setuju bahwa sawit banyak menyerap tenaga kerja, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan skala usaha dan tingkat mekanisasi. Temuan ini sejalan dengan Rist et al. (2010) yang menegaskan bahwa ekspansi kelapa sawit membuka banyak lapangan kerja di perdesaan Indonesia, serta Cramb dan Curry (2012) yang menyatakan bahwa sawit berperan ganda sebagai sumber pendapatan pekebun kecil sekaligus penyedia lapangan kerja.

Dari sisi pendapatan, 80% responden menilai sawit menghasilkan pendapatan yang stabil karena dapat dipanen sepanjang tahun, 92% menyatakan pendapatan masyarakat sebagian besar berasal dari sawit, dan 94% setuju bahwa sawit meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, 95% responden menyatakan bahwa perkebunan sawit meningkatkan kesejahteraan pekebun. Hasil ini sejalan dengan Feintrenie et al. (2010) dan Euler et al. (2016) yang menegaskan peran sawit sebagai penggerak pembangunan perdesaan. Meski demikian, ketergantungan yang tinggi pada satu komoditas membuat pekebun rentan terhadap fluktuasi harga TBS yang dipengaruhi pasar global *crude palm oil* (CPO), sehingga diversifikasi usaha dan penguatan akses modal tetap diperlukan.

Perilaku Pekebun terhadap Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Perilaku pekebun dinilai melalui lima indikator praktik budidaya berkelanjutan. Pembukaan lahan tanpa bakar mewakili upaya mengurangi emisi dan pencemaran udara (Tacconi, 2016); penggunaan pupuk organik dan pengendalian OPT secara organik mencerminkan upaya menjaga kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada bahan kimia (Susanti & Maryono, 2018); penggunaan bibit bersertifikat berkaitan dengan produktivitas dan efisiensi usaha (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020b); sedangkan penggunaan lahan bebas konflik mewakili aspek sosial dan kepastian hukum (Colchester & Chao, 2013). Distribusi jawaban responden disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perilaku Pekebun dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit (%)

No	Indikator perilaku	SS	S	N	TS	STS	SS + S
1	Membuka atau membersihkan lahan tanpa dibakar	27	60	3	10	0	87
2	Menggunakan pupuk organik	9	48	15	25	3	57
3	Mengendalikan OPT secara organik	2	23	9	66	0	25
4	Menggunakan bibit bersertifikat	25	51	3	21	0	76
5	Menggunakan lahan yang bebas konflik	51	49	0	0	0	100

Sumber: Data primer diolah, 2025; pernyataan kuesioner diadaptasi dari Yutika et al. (2019)

Sebanyak 87% responden telah membuka atau membersihkan lahan tanpa dibakar. Perilaku ini sejalan dengan tingginya pengetahuan pekebun bahwa pembakaran menyebabkan pencemaran udara (97%), yang kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya sosialisasi mengenai bahaya kabut asap (Tacconi, 2016). Meski demikian, masih terdapat 13% responden yang tidak setuju atau ragu, dan praktik pembakaran masih ditemukan di

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

lapangan (Gambar 3). Sebagian pekebun masih menganggap pembakaran sebagai cara yang lebih praktis, murah, dan cepat (Gellert, 2015), meskipun praktik tebas-bakar menimbulkan hilangnya kesuburan tanah, risiko kebakaran, dan pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar (Miettinen et al., 2017).



Gambar 3. Pembukaan lahan dengan cara dibakar di kebun rakyat Kabupaten Dharmasraya

Penggunaan pupuk organik baru diterapkan oleh 57% responden, sedangkan 28% tidak setuju dan 15% bersikap netral. Pupuk organik berperan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, dan mendukung aktivitas mikroorganisme tanah (Hartatik & Widowati, 2006). Hambatan penerapannya antara lain keterbatasan ketersediaan pupuk organik, biaya yang dianggap lebih tinggi, serta anggapan bahwa pupuk kimia memberikan hasil yang lebih cepat terlihat (Suriadikarta & Simanungkalit, 2006). Kondisi ini diperkuat oleh tingkat pendidikan responden yang sebagian besar menengah ke bawah, sehingga pemahaman budidaya lebih banyak diperoleh dari pengalaman dibandingkan pelatihan formal.

Pengendalian OPT secara organik merupakan indikator dengan tingkat penerapan terendah, yaitu hanya 25%, sedangkan 66% responden tidak setuju menggunakan metode organik. Pekebun menganggap pestisida kimia lebih efektif dan praktis, meskipun berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan pekerja, dan residu pada hasil produksi (Puspitarini, 2013). Rendahnya penerapan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan, minimnya pendampingan teknis, serta persepsi bahwa metode organik membutuhkan biaya dan tenaga lebih besar (Nair, 2011). Rendahnya pemahaman terhadap ISPO turut memperkuat kecenderungan tersebut.

Sebanyak 76% responden menggunakan bibit bersertifikat, yang menunjukkan kesadaran akan peran bibit unggul dalam meningkatkan hasil panen, kualitas produksi, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020b). Adapun 21% responden yang tidak setuju kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan akses dan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

harga bibit bersertifikat yang relatif lebih tinggi (Pahan, 2012), sejalan dengan Purnomo et al. (2018) yang menyatakan bahwa rendahnya akses informasi dan distribusi benih bersertifikat masih menjadi kendala pekebun kecil. Sementara itu, seluruh responden (100%) menyatakan menggunakan lahan yang bebas konflik. Kepastian hukum atas lahan dan hubungan sosial yang harmonis merupakan prasyarat keberlanjutan perkebunan (Marti, 2008), dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal juga menjadi kriteria utama dalam sertifikasi sawit berkelanjutan (RSPO, 2018).

Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat berdasarkan Prinsip ISPO

Hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan prinsip dan kriteria ISPO untuk menggambarkan tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Prinsip ISPO

Prinsip ISPO	Kriteria	Temuan penelitian
Kepatuhan regulasi	Legalitas pekebun	Sebagian besar memiliki bukti kepemilikan lahan; 100% menyatakan bebas konflik
	Lokasi kebun	Lahan berada di luar kawasan hutan dan tidak ditemukan sengketa besar
	Izin lingkungan	Mayoritas pekebun belum memahami kewajiban izin lingkungan
Praktik pertanian yang baik (GAP)	Pembukaan lahan	87% tidak lagi melakukan pembakaran lahan
	Penanaman	76% menggunakan bibit bersertifikat
	Pengelolaan hama	25% melakukan pengendalian hama secara organik
	Penanganan limbah pestisida	Belum ada sistem pengelolaan limbah; pekebun menganggap tidak ada limbah yang perlu ditangani
Lingkungan dan keanekaragaman hayati	Pencegahan kebakaran	87% tidak lagi melakukan pembakaran lahan
	Konservasi biodiversitas	Sawit dinilai menurunkan keanekaragaman hayati dan memicu konflik satwa–manusia
Keberlanjutan usaha	Manfaat ekonomi	94% menyatakan sawit meningkatkan pendapatan; 87% menilai sawit menambah lapangan kerja; 97% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal

Sumber: Data primer diolah, 2025

Pada aspek kepatuhan regulasi, sebagian besar pekebun telah memiliki bukti kepemilikan lahan dan seluruhnya menyatakan bebas konflik. Kepastian hukum dan minimnya sengketa merupakan prasyarat keberlanjutan usaha perkebunan rakyat (Santika et al., 2021). Namun, rendahnya pemahaman terhadap kewajiban izin lingkungan menjadi hambatan, padahal dokumen lingkungan seperti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) merupakan komponen wajib dalam sertifikasi ISPO (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2020a).

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

Pada aspek praktik pertanian yang baik, perkembangan positif terlihat dari 87% pekebun yang tidak lagi membakar lahan, sejalan dengan kebijakan nasional pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta komitmen pengurangan emisi (KLHK, 2022), serta 76% pekebun yang menggunakan bibit bersertifikat. Kelemahan masih terdapat pada pengendalian hama dan pengelolaan limbah, karena mayoritas pekebun menggunakan pestisida kimia tanpa sistem penanganan limbah. Arifin et al. (2022) menekankan pentingnya *integrated pest management* dan sistem penanganan limbah sederhana yang dapat diadaptasi pekebun rakyat. Pada aspek lingkungan, praktik tanpa bakar menekan risiko degradasi ekosistem akibat kebakaran (Page et al., 2002), tetapi 13% pekebun masih memerlukan edukasi agar sepenuhnya meninggalkan pembakaran, dan konservasi biodiversitas belum menjadi perhatian. Sementara itu, pada aspek keberlanjutan usaha, kontribusi ekonomi sawit sudah dirasakan nyata oleh pekebun.

Secara keseluruhan, tata kelola sawit rakyat di Kabupaten Dharmasraya telah menunjukkan arah yang positif pada aspek legalitas lahan, praktik pembukaan lahan, dan kontribusi ekonomi. Namun, masih terdapat kelemahan pada pemenuhan izin lingkungan, pengelolaan limbah pestisida, pengendalian hama ramah lingkungan, dan konservasi biodiversitas. Pola ini menunjukkan bahwa praktik yang telah diketahui dampaknya secara langsung, seperti pembakaran lahan, lebih banyak diterapkan, sedangkan praktik yang dampaknya bersifat jangka panjang masih rendah. Dengan demikian, perilaku pekebun sangat dipengaruhi oleh tingkat persepsi dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga peningkatan pengetahuan melalui pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan pekebun perlu menjadi prioritas.

Kecenderungan pekebun yang lebih peka terhadap dampak jangka pendek dibandingkan dampak jangka panjang dapat dijelaskan oleh lima faktor. Pertama, dampak pembakaran lahan bersifat kasatmata dan langsung dirasakan: asap terlihat, tercium, dan mengganggu pernapasan pada hari yang sama, sedangkan penurunan kualitas air tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati berlangsung perlahan, tidak terlihat, dan baru terasa setelah bertahun-tahun. Risiko yang terasa jauh secara waktu, ruang, dan pengalaman pribadi cenderung dipersepsikan lebih abstrak dan kurang mendesak (Trope & Liberman, 2010; Spence et al., 2012), sementara persepsi risiko yang terbentuk dari pengalaman langsung jauh lebih kuat dibandingkan persepsi yang terbentuk dari informasi (Weber, 2006). Kedua, pembakaran lahan memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang jelas, karena Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan melarang pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar (Pemerintah Republik Indonesia, 2014), dan larangan tersebut gencar disosialisasikan sejak kebakaran hutan dan lahan besar tahun 2015 (Tacconi, 2016); sebaliknya, pekebun tidak menerima sanksi maupun umpan balik apa pun ketika kualitas air atau habitat satwa menurun. Ketiga, dampak jangka panjang bersifat kumulatif dari banyak kebun dan pabrik kelapa sawit, sehingga pekebun sulit mengaitkan praktik di kebunnya sendiri dengan perubahan lingkungan di tingkat lanskap. Keempat, ketergantungan ekonomi yang tinggi, yaitu 92% responden menyatakan pendapatan masyarakat sebagian besar berasal dari sawit, serta skala lahan yang kecil membuat pekebun lebih memprioritaskan pendapatan saat ini dibandingkan manfaat lingkungan yang baru diperoleh di masa depan. Kelima, karena pengetahuan budidaya lebih banyak diperoleh dari pengalaman lapangan dibandingkan pelatihan formal, pekebun

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

cenderung hanya menangkap dampak yang dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, penyuluhan tentang dampak jangka panjang perlu dibuat kasatmata, misalnya melalui uji sederhana kualitas air sumur bersama kelompok tani, demonstrasi plot sempadan sungai, dan pemetaan konflik satwa di tingkat nagari.

Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan sertifikasi ISPO di Kabupaten Dharmasraya bersifat berjenjang: pekebun tidak mengetahui ISPO, kebun belum teregistrasi, dan biaya sertifikasi tidak terjangkau. Dengan sekitar 500 pekebun yang memiliki STDB pada tahun 2023, atau kurang dari 2% dari 29.222 pekebun, serta kewajiban ISPO bagi pekebun yang berlaku mulai tahun 2029, pemerintah daerah memerlukan langkah yang lebih terarah. Beberapa rekomendasi kebijakan praktis yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut.

1. *Percepatan STDB berbasis digital.* Dinas Pertanian dapat memanfaatkan sistem e-STDB yang didorong Kementerian Pertanian untuk mempercepat registrasi kebun rakyat (Industry.co.id, 2024) dengan pola jemput bola: penyuluh dan petugas kecamatan mendata lokasi kebun dan dokumen kepemilikan lahan, lalu mengunggah permohonan secara kolektif pada pertemuan kelompok tani. Pendataan dapat diprioritaskan pada sekitar 4.000 pekebun calon peserta PSR dengan target tahunan yang terukur hingga tahun 2029.
2. *Pemanfaatan dana bagi hasil (DBH) sawit.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 memungkinkan sebagian DBH sawit digunakan untuk pendataan perkebunan sawit rakyat, penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD-KSB), serta pembinaan dan pendampingan sertifikasi ISPO (Kementerian Keuangan, 2023). Pemerintah daerah perlu mengalokasikan porsi tersebut secara eksplisit untuk pendataan STDB dan pendampingan kelompok tani, serta menyusun RAD-KSB Kabupaten Dharmasraya sebagai payung program.
3. *Skema pembiayaan sertifikasi berkelompok.* Sertifikasi ISPO bagi pekebun dapat diajukan secara berkelompok, dan pendanaannya dapat disalurkan melalui kelompok pekebun, gabungan kelompok, atau koperasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) saat ini membiayai tahapan sertifikasi pekebun melalui Program Sarana dan Prasarana, mulai dari pendataan STDB, komitmen pengelolaan lingkungan, pelatihan sistem kendali internal (*internal control system*), pendampingan, hingga audit sertifikasi (Kontan, 2026). Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan membentuk koperasi atau gabungan kelompok tani percontohan di setiap kecamatan, mendampingi penyusunan proposal kolektif ke BPDP, serta menanggung biaya pendampingan yang tidak dibiayai BPDP melalui APBD atau DBH sawit.
4. *Integrasi insentif program.* Pekebun yang telah memiliki STDB dan tergabung dalam kelompok bersertifikat perlu diprioritaskan dalam program PSR, bantuan bibit bersertifikat, serta sarana pengendalian OPT ramah lingkungan, sehingga sertifikasi memberikan manfaat langsung yang dirasakan pekebun dan tidak dipandang semata sebagai beban administrasi.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perilaku pekebun terhadap tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Dharmasraya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Dharmasraya umumnya belum mengetahui keberadaan, tujuan, prinsip, dan manfaat ISPO sehingga belum ada pekebun yang tersertifikasi. Penerapan ISPO masih berada pada tahap awal, yaitu registrasi kebun melalui STDB, dan terkendala keterbatasan anggaran serta sosialisasi.
2. Persepsi pekebun terhadap ISPO berkaitan dengan terbatasnya pengetahuan pekebun mengenai aspek ekologi perkebunan kelapa sawit, sehingga pekebun belum sepenuhnya menerapkan konsep keberlanjutan. Pekebun lebih menyadari dampak yang bersifat langsung, seperti pencemaran udara akibat pembakaran (97%), dibandingkan dampak jangka panjang seperti penurunan kualitas air tanah (38%) dan keanekaragaman hayati.
3. Perilaku pekebun dalam pengelolaan kebun dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan persepsi yang dimiliki. Sebagian besar pekebun telah membuka lahan tanpa bakar (87%), menggunakan bibit bersertifikat (76%), dan menggunakan lahan bebas konflik (100%), tetapi penggunaan pupuk organik (57%) dan pengendalian OPT secara organik (25%) masih rendah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, disarankan untuk (a) mempercepat penerbitan STDB melalui e-STDB dengan pola jemput bola dan target tahunan hingga tahun 2029; (b) mengalokasikan DBH sawit untuk pendataan kebun, penyusunan RAD-KSB, dan pendampingan sertifikasi ISPO; (c) memfasilitasi koperasi atau gabungan kelompok tani dalam mengakses pembiayaan sertifikasi berkelompok dari BPDP; (d) mengaitkan kepemilikan STDB dan sertifikat ISPO dengan prioritas program PSR dan bantuan sarana produksi; serta (e) melaksanakan penyuluhan yang membuat dampak lingkungan jangka panjang menjadi kasatmata bagi pekebun.
2. Bagi pekebun dan kelembagaan pekebun, perlu penguatan kelompok tani dan koperasi agar akses terhadap pelatihan, pupuk organik, teknologi pengendalian hama ramah lingkungan, dan bibit bersertifikat menjadi lebih mudah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, cakupan wilayah kajian perlu diperluas agar gambaran mengenai perilaku pekebun terhadap penerapan ISPO lebih komprehensif dan dapat dibandingkan antardaerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., Ismail, S., & Bhat, A. H. (2013). Pollution mitigation of palm oil mill effluent (POME) using membrane technology. *International Journal of Environmental Science and Technology, 10*(3), 551–564. https://doi.org/10.1007/s13762-013-0180-6

Aisyah, D. D., Irham, & Mulyo, J. H. (2021). Understanding the palm oil smallholders characteristics and their compliance towards the Indonesian Sustainable Palm Oil

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

(ISPO): A case study in North Sumatera, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 637*, 012041. https://doi.org/10.1088/1755-1315/637/1/012041

Anggun, G. (2024). *Evaluasi kesesuaian lahan pada tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) di Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya* [Skripsi, Universitas Andalas].

Arifin, B., Sahide, M. A. K., Supriatna, J., & Maryudi, A. (2022). Smallholder oil palm governance: Certification, productivity, and environmental challenges in Indonesia. *Journal of Cleaner Production, 331*, 129960. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129960

Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2025). *Luas lahan dan produksi tanaman kelapa sawit Kabupaten Dharmasraya 2020–2024*. BPS Kabupaten Dharmasraya.

Basir, R. R. (2025). Tata kelola kebijakan di Indonesia terhadap isu ekspansi kelapa sawit. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2*(1), 79–95.

Colchester, M., & Chao, S. (2013). *Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme, Sawit Watch, & TUK Indonesia.

Cramb, R., & Curry, G. N. (2012). Oil palm and rural livelihoods in the Asia–Pacific region: An overview. *Asia Pacific Viewpoint, 53*(3), 223–239. https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2012.01495.x

Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020a). *Pedoman pelaksanaan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perkebunan. (2020b). *Statistik perkebunan Indonesia 2019–2021: Kelapa sawit*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Euler, M., Hoffmann, M. P., Fathoni, Z., & Schwarze, S. (2016). Exploring yield gaps in smallholder oil palm production systems in eastern Sumatra, Indonesia. *Agricultural Systems, 146*, 111–119. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2016.04.007

Fatchiya, A., Sulistyawati, A., Tonny, F., Siwi, M., Adisantoso, J., Budiarto, T., & Prasetyo, K. (2022). Karakteristik sosiodemografis dan ketenagakerjaan perempuan di perkebunan sawit, Provinsi Lampung. *Jurnal Penyuluhan, 18*(01), 155–163.

Feintrenie, L., Chong, W. K., & Levang, P. (2010). Why do farmers prefer oil palm? Lessons learnt from Bungo district, Indonesia. *Small-Scale Forestry, 9*(3), 379–396. https://doi.org/10.1007/s11842-010-9122-2

Fitzherbert, E. B., Struebig, M. J., Morel, A., Danielsen, F., Brühl, C. A., Donald, P. F., & Phalan, B. (2008). How will oil palm expansion affect biodiversity? *Trends in Ecology & Evolution, 23*(10), 538–545.

Gaveau, D. L. A., Salim, M. A., Hergoualc'h, K., Locatelli, B., Sloan, S., Wooster, M., Marlier, M. E., Molidena, E., Yaen, H., DeFries, R., Verchot, L., Murdiyarso, D., Nasi, R., Holmgren, P., & Sheil, D. (2014). Major atmospheric emissions from peat fires in Southeast Asia during non-drought years: Evidence from the 2013 Sumatran fires. *Scientific Reports, 4*, 6112. https://doi.org/10.1038/srep06112

Gellert, P. K. (2015). Palm oil expansion in Indonesia: Land grabbing as accumulation by dispossession. Dalam *Current Perspectives in Social Theory* (Vol. 34). Emerald Group Publishing. https://doi.org/10.1108/S0278-120420150000034004

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

Giam, X., Mani, L., Koh, L. P., & Tan, H. T. W. (2016). Saving tropical forests by knowing what we consume. *Conservation Letters, 9*(4), 267–274. https://doi.org/10.1111/conl.12209

Hartatik, W., & Widowati, L. R. (2006). Peranan pupuk organik dalam peningkatan produktivitas tanah dan tanaman. *Jurnal Sumberdaya Lahan, 1*(2), 35–44.

Hidayat, N. K., Offermans, A., & Glasbergen, P. (2018). Sustainable palm oil as a public responsibility? On the governance capacity of Indonesian Standard for Sustainable Palm Oil (ISPO). *Agriculture and Human Values, 35*(1), 223–242. https://doi.org/10.1007/s10460-017-9816-6

Hospes, O. (2014). Marking the success or end of global multi-stakeholder governance? The rise of national sustainability standards in Indonesia and Brazil for palm oil and soy. *Agriculture and Human Values, 31*(3), 425–437. https://doi.org/10.1007/s10460-014-9511-9

Industry.co.id. (2024, 28 November). *Kementan dorong percepatan sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit ISPO lewat e-STBD*. https://www.industry.co.id/read/138334/kementan-dorong-percepatan-sistem-sertifikasi-perkebunan-kelapa-sawit-ispo-lewat-e-stbd

Julius, J., Wibowo, S., & Hartono, H. (2017). Analisis emisi gas buang kendaraan pengangkut hasil perkebunan. *Jurnal Teknologi Lingkungan, 18*(2), 85–94.

Kementerian Keuangan. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Inventarisasi gas rumah kaca sektor energi: Laporan tahunan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Laporan inventarisasi gas rumah kaca dan monitoring, pelaporan, verifikasi (MPV) aksi mitigasi perubahan iklim tahun 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Kementerian Pertanian. (2015). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)*.

Kontan. (2026, 29 April). *Perkuat daya saing ekspor, BPDP dan GPPI percepat sertifikasi ISPO petani sawit*. https://industri.kontan.co.id/news/perkuat-daya-saing-ekspor-bpdp-dan-gppi-percepat-sertifikasi-ispo-petani-sawit

Marlier, M. E., DeFries, R. S., Kim, P. S., Koplitz, S. N., Jacob, D. J., Mickley, L. J., & Myers, S. S. (2015). Fire emissions and regional air quality impacts from fires in oil palm, timber, and logging concessions in Indonesia. *Environmental Research Letters, 10*(8), 085005. https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/8/085005

Marti, S. (2008). *Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia*. Friends of the Earth, LifeMosaic, & Sawit Watch.

Martianto, D., Siregar, H., & Murniati, K. (2020). Challenges of smallholders in implementing Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification. *International Journal of Applied Business Research, 2*(2), 99–108.

Meijaard, E., Garcia-Ulloa, J., Sheil, D., Wich, S. A., Carlson, K. M., Juffe-Bignoli, D., & Brooks, T. M. (2018). *Oil palm and biodiversity: A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force*. IUCN. https://portals.iucn.org/library/node/47753

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

Merten, J., Röll, A., Guillaume, T., Meijide, A., Tarigan, S., Agusta, H., Dislich, C., Dittrich, C., Faust, H., Gunawan, D., Hein, J., Hendrayanto, Knohl, A., Kuzyakov, Y., Wiegand, K., & Hölscher, D. (2016). Water scarcity and oil palm expansion: Social views and environmental processes. *Ecology and Society, 21*(2), 5. https://doi.org/10.5751/ES-08214-210205

Miettinen, J., Shi, C., & Liew, S. C. (2017). Fire distribution in Peninsular Malaysia, Sumatra and Borneo in 2015 with special emphasis on peatland fires. *Environmental Management, 60*(4), 747–757. https://doi.org/10.1007/s00267-017-0911-7

Nair, K. S. S. (2011). Pest outbreaks in tropical forest plantations: Is there a greater risk for exotic tree species? *Forest Ecology and Management, 261*(12), 2061–2068.

Nashr, F., Putri, E. I. K., Dharmawan, A. H., & Fauzi, A. (2021). The sustainability of independent palm oil smallholders in multi-tier supply chains in East Kalimantan Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning, 16*(4), 771–781.

Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society, 17*(1), 25. https://doi.org/10.5751/ES-04775-170125

Page, S. E., Siegert, F., Rieley, J. O., Boehm, H. V., Jaya, A., & Limin, S. (2002). The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. *Nature, 420*, 61–65. https://doi.org/10.1038/nature01131

Pahan, I. (2012). *Panduan lengkap kelapa sawit: Manajemen agribisnis dari hulu hingga hilir*. Penebar Swadaya.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (2025). *Profil Kabupaten Dharmasraya*. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2018). Reducing forest and land fires through good palm oil value chain governance. *Forest Policy and Economics, 91*, 94–106. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.12.014

Puspitarini, R. D. (2013). Dampak penggunaan pestisida terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Hama Terpadu*, 125–133.

Ramadhani, M. T., & Maulidian, M. O. R. (2020). Persepsi masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit ditinjau dari aspek ekologi dan ekonomi di Gampong Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Pendidikan Geosfer, 5*(2).

Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010). The livelihood impacts of oil palm: Smallholders in Indonesia. *Biodiversity and Conservation, 19*(4), 1009–1024. https://doi.org/10.1007/s10531-010-9815-z

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Submitted: 23/10/2026; Revised: 29/10/2026;
Accepted: 03/11/2026; Published: 07/11/2026

RSPO. (2018). *Principles and criteria for the production of sustainable palm oil*. Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Santika, T., Wilson, K. A., Law, E. A., St John, F. A. V., Carlson, K. M., Gibbs, H., Morgans, C. L., Ancrenaz, M., Meijaard, E., & Struebig, M. J. (2021). Impact of palm oil sustainability certification on village well-being and poverty in Indonesia. *Nature Sustainability, 4*(2), 109–119. https://doi.org/10.1038/s41893-020-00630-1

Savilaakso, S., Garcia, C., Garcia-Ulloa, J., Ghazoul, J., Groom, M., Guariguata, M. R., Laumonier, Y., Nasi, R., Petrokofsky, G., Snaddon, J., & Zrust, M. (2014). Systematic review of effects on biodiversity from oil palm production. *Environmental Evidence, 3*(4), 1–21. https://doi.org/10.1186/2047-2382-3-4

Siahaan, H. N., Waluyati, L., & Masyhuri, M. (2023). Intentions and behavior of partner palm oil farmers PT Hari Sawit Jaya on sustainable palm oil management. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 7*(2), 944–953.

Spence, A., Poortinga, W., & Pidgeon, N. (2012). The psychological distance of climate change. *Risk Analysis, 32*(6), 957–972. https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2011.01695.x

Suardi, T. F., Sulistyowati, L., Noor, T. I., & Setiawan, I. (2022). Analysis of the sustainability level of smallholder oil palm agribusiness in Labuhanbatu Regency, North Sumatra. *Agriculture, 12*(9), 1469.

Suriadikarta, D. A., & Simanungkalit, R. D. M. (2006). *Pupuk organik dan pupuk hayati*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Susanti, L., & Maryono, A. (2018). Pengendalian hama terpadu dalam budidaya kelapa sawit berkelanjutan. *Jurnal Agroforestri, 3*(2), 45–56.

Tacconi, L. (2016). Preventing fires and haze in Southeast Asia. *Nature Climate Change, 6*(7), 640–643. https://doi.org/10.1038/nclimate3008

Trope, Y., & Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. *Psychological Review, 117*(2), 440–463. https://doi.org/10.1037/a0018963

Weber, E. U. (2006). Experience-based and description-based perceptions of long-term risk: Why global warming does not scare us (yet). *Climatic Change, 77*(1–2), 103–120. https://doi.org/10.1007/s10584-006-9060-3

World Health Organization. (2016). *Ambient air pollution: A global assessment of exposure and burden of disease*. WHO.

Yutika, F., Cahyadi, E. R., & Mulyati, H. (2019). Perilaku petani kelapa sawit pola swadaya dan pola plasma terhadap praktik produksi kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kampar, Riau. *Jurnal Agribisnis Indonesia, 7*(2), 102–112

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.